



Political Participation Typologies and Digital Media Access: A Cluster Analysis of Urban-Periurban Voters in Bogor, Indonesia

Tipologi dan Segmentasi Partisipasi Politik Berdasarkan Akses Media Informasi Digital di Kota dan Kabupaten Bogor

OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online)
ISSN 2302-6790 (print)

Edited by:

Didik Hariyanto

*Correspondence:

whoseziworkspace@gmail.com

Citation:

Mochammad Fahrezi Putra
Widjaya, Roni Jayawinangun, dan
Ahsani Taqwim Aminuddin. (2026).
Tipologi dan Segmentasi
Partisipasi Politik Berdasarkan
Akses Media Informasi Digital di
Kota dan Kabupaten Bogor. 15(1)

Doi: 10.21070/kanal.v15i1.2075

Mochammad Fahrezi Putra Widjaya¹, Roni Jayawinangun², Ahsani Taqwim Aminuddin³
1-3/Universitas Pakuan, Indonesia

Abstract

The digital transformation in Indonesia has led to a paradox in which rapid internet penetration has not proportionally increased political participation, particularly at the local level. Bogor City and Bogor Regency, with West Java internet penetration reaching 82.73% in 2024, represent an ideal urban-periurban laboratory to examine this phenomenon. This study aims to (1) analyze the influence of digital media information access on political participation, (2) compare digital media access and political participation between Bogor City and Bogor Regency, and (3) identify political participation typologies based on digital media information access. A quantitative cross-sectional survey was conducted involving 404 respondents registered in the 2024 Regional Election Permanent Voter List. Data were analyzed using simple linear regression, Spearman's Rho correlation, Mann-Whitney U test, and K-Means Clustering. Results indicate that digital media information access has a positive and significant effect on political participation ($B = 0.349$; $F = 55.605$; $\text{Sig.} < 0.001$; $R^2 = 12.2\%$), with a weak-to-moderate correlation ($r = 0.320$). No significant differences were found between Bogor City and Bogor Regency in either digital media access ($\text{Sig.} = 0.840$) or political participation ($\text{Sig.} = 0.321$). K-Means Clustering identified three distinct typologies: Active Participants (high access, high participation), Moderate Participants (medium access, medium participation), and Passive Participants (low access, low participation). These findings confirm the multi-level digital divide framework and the participation typology, revealing that access intensity rather than geography is the primary determinant of civic engagement patterns.

Keywords: Digital Media Information Access, Political Participation, Typology, K-Means Clustering, Digital Divide, Bogor

Abstrak

Transformasi digital di Indonesia telah memunculkan paradoks menarik. Penetrasi internet yang sangat pesat tidak diimbangi oleh peningkatan partisipasi politik yang proporsional, terutama pada Tingkat lokal. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dengan Tingkat penetrasi internet Jawa Barat mencapai 82.73% pada tahun 2024,

menyediakan laboratorium ideal berbasis urban-periurban untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh akses informasi melalui media digital terhadap tingkat partisipasi politik; (2) membandingkan pola akses media digital dan partisipasi politik antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor; serta (3) mengidentifikasi tipologi partisipasi politik berdasarkan variabel akses informasi media digital. Pendekatan metode yang digunakan adalah survei lintang kuantitatif terhadap 404 responden yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Analisis data dilakukan melalui regresi linier sederhana, korelasi Spearman Rho, uji Mann-Whitney U, dan pengelompokan K-Means. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses informasi media digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik, dengan koefisien regresi $B = 0.349$; $F = 55.605$; $\text{Sig.} < 0.001$; serta $R^2 = 12.2$ persen. Korelasi menunjukkan hubungan lemah hingga sedang ($r = 0.320$). Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara kedua wilayah baik pada akses media digital ($\text{Sig.} = 0.840$) maupun partisipasi politik ($\text{Sig.} = 0.321$). Pengelompokan K-Means mengungkap tiga tipologi utama: Partisipan Aktif (akses tinggi dan partisipasi tinggi), Partisipan Moderat (akses sedang dan partisipasi sedang), serta Partisipan Pasif (akses rendah dan partisipasi rendah). Temuan ini menginformasi kerangka multi-level digital divide serta tipologi partisipasi. Intensitas akses menjadi penentu primer pola keterlibatan sipil, bukan factor geografis.

Kata Kunci: Akses Media Informasi Digital, Partisipasi Politik, Tipologi, K-Means Clustering, Digital Divide, Bogor

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam cara masyarakat mengakses informasi, membentuk opini publik, serta berpartisipasi dalam proses politik (Boulianne, 2018). Transformasi ini menandai pergeseran dari pola komunikasi politik konvensional menuju ekosistem digital yang ditandai oleh kecepatan distribusi informasi, interaktivitas tinggi, serta keterlibatan aktor non-negara yang semakin dominan (Papathanassopoulos & Giannouli, 2025; Widodo & Kristiyono, 2025). Media informasi digital, khususnya internet dan media sosial, tidak lagi berfungsi semata sebagai saluran informasi, melainkan sebagai ruang deliberasi, mobilisasi, dan kontestasi politik yang memengaruhi perilaku politik warga secara signifikan (Boulianne, 2018).

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia mengalami akselerasi digital yang sangat pesat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, penetrasi internet nasional meningkat secara signifikan dari 25.9% pada tahun 2011 menjadi sekitar 66% pada tahun 2022 (Sugandi et al., 2024). Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan ekspansi infrastruktur digital, tetapi juga perubahan mendasar dalam pola konsumsi informasi politik masyarakat. Media informasi digital memungkinkan warga mengakses beragam sumber informasi politik secara *real time*, membangun jaringan diskusi politik lintas wilayah, serta mengekspresikan preferensi politiknya secara lebih terbuka dibandingkan era media konvensional (Boulianne et al., 2024).

Namun demikian, literatur mutakhir menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap media informasi digital tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas maupun intensitas partisipasi politik. (Van Dijk, 2019) menegaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan akses teknis terhadap internet (*first-level digital divide*), tetapi juga mencakup perbedaan dalam kemampuan penggunaan, pemrosesan informasi, dan pemanfaatan politik dari media digital (*second* dan *third-level digital divide*). Dalam konteks ini, media digital berpotensi memperkuat partisipasi politik kelompok tertentu, sekaligus memperdalam apatisme atau keterasingan politik kelompok lainnya.

Fenomena tersebut memunculkan paradoks pada demokrasi digital karena di satu sisi, media informasi digital memperluas ruang partisipasi dan mempercepat mobilisasi politik sedangkan di sisi lain, ia juga dapat menghasilkan partisipasi yang dangkal, berbasis emosi, atau bahkan penarikan diri dari proses politik formal (Desersis, 2021; Lorenz-spren et al., 2023). Oleh karena itu, memahami bagaimana variasi akses dan penggunaan media informasi digital membentuk pola partisipasi politik yang berbeda menjadi isu teoretis dan empiris yang semakin relevan, khususnya di negara berkembang dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi seperti Indonesia.

Konteks empiris Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik sekaligus problematik. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih

pada Pemilihan Presiden 2024 mencapai 81.78%, namun pada Pilkada Serentak 2024 angka partisipasi menurun menjadi 68.1%, yang merupakan Tingkat partisipasi terendah sejak system pemilihan kepala daerah serentak diterapkan (Arini, 2024). Penurunan ini terjadi di tengah kondisi penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang justru semakin masif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingginya keterpaparan masyarakat terhadap media informasi digital tidak secara otomatis mendorong partisipasi politik elektoral yang berkelanjutan, khususnya pada level politik lokal.

Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia mencerminkan dinamika tersebut secara jelas. Pada tahun 2024, penetrasi internet di Jawa Barat mencapai 82.73%, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat adopsi teknologi digital tertinggi di Indonesia (APJII, 2024). Meski demikian, variasi tingkat partisipasi politik antardaerah di Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh tingkat akses internet semata. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor akses media informasi digital perlu dipahami secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan pola penggunaannya.

Kota dan Kabupaten Bogor menjadi lokasi studi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Secara geografis dan sosial, Bogor merepresentasikan wilayah urban–periurban yang unik, dengan karakteristik heterogenitas tinggi dalam hal infrastruktur digital, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, serta stratifikasi sosial ekonomi. Kota Bogor memiliki karakter urban dengan tingkat penetrasi teknologi dan layanan publik digital yang relatif tinggi, sementara Kabupaten Bogor mencerminkan wilayah periurban hingga semi-rural dengan tingkat akses dan literasi digital yang lebih beragam (Hadi, 2018). Konfigurasi ini menjadikan Bogor sebagai laboratorium sosial yang ideal untuk menganalisis bagaimana perbedaan akses media informasi digital berkelindan dengan variasi partisipasi politik. Secara empiris, relevansi Kota dan Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian diperkuat oleh dua fenomena yang saling berkelindan. Dari sisi partisipasi politik, data KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Bogor hanya mencapai 63% dari 815.249 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (KPU Kota Bogor, 2024), jauh di bawah target 85%. Di Kabupaten Bogor, angka partisipasi bahkan lebih rendah, yakni 58,7 persen dari total 3.926.080 DPT, dengan 1.620.838 pemilih tidak menggunakan hak suaranya (KPU Kabupaten Bogor, 2024). Kedua angka ini berada di bawah rata-rata nasional Pilkada 2024 sebesar 68,1% (Arini, 2024), menjadikan Kota dan Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan defisit partisipasi yang signifikan dan layak dikaji lebih mendalam. Dari sisi akses media informasi digital, Kota dan Kabupaten Bogor berada dalam koridor metropolitan Jabodetabek dengan infrastruktur digital yang relatif maju. Jawa Barat mencatat penetrasi internet tertinggi kedua secara nasional, yakni 82.73% pada tahun 2024 (APJII, 2024), dan kedua wilayah Bogor secara konsisten menjadi bagian dari zona dengan konektivitas digital tertinggi di provinsi tersebut. Paradoks antara tingginya penetrasi internet di satu sisi dan rendahnya partisipasi politik di sisi lain inilah yang

menjadikan Kota dan Kabupaten Bogor sebagai konteks empiris yang strategis untuk mengkaji hubungan antara akses media informasi digital dan partisipasi politik secara sistematis dan berbasis data.

Penelitian mengenai peran media social dalam peningkatan partisipasi pemilih di wilayah Bogor telah dilakukan oleh Ratnamulyani & Maksudi (2018) menemukan bahwa meskipun penggunaan media sosial semakin masif di kalangan pelajar pemilih pemula di Kabupaten Bogor, para politisi dan partai politik belum optimal memanfaatkannya, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi politik. Temuan ini relevan sebagai titik awal historis yang menggambarkan hubungan antara ketersediaan media digital dan keterlibatan politik di Kabupaten Bogor. Perbedaannya, Ratnamulyani & Maksudi, (2018), sementara penelitian ini menggunakan analisis kluster kuantitatif untuk membangun tipologi partisipasi berbasis akses media informasi digital.

Sejumlah penelitian di Bogor menunjukkan dinamika relevan antara media digital dan partisipasi politik. Lestari & Rohimakumullah (2022), menemukan tingkat kepuasan publik 76.12% terhadap penggunaan Instagram Pemkot Bogor, namun kepuasan terhadap informasi digital tidak serta-merta mendorong partisipasi politik yang aktif. Penelitian Anggraeni et al., (2025) justru mengidentifikasi adanya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota dan Kabupaten Bogor, yang dikaitkan dengan fragmentasi sumber informasi politik dan ketimpangan aksesibilitas media.

Kajian mengenai tipologi partisipasi politik berbasis penggunaan sumber informasi di wilayah Bogor telah dilakukan oleh Jayawinangun & Valdiani, (2020) mengungkap bahwa tipologi partisipasi politik pemilih laki-laki di Kabupaten Bogor tidak bersifat homogen, melainkan bervariasi berdasarkan pola penggunaan sumber informasi politik, dengan realisasi partisipasi Pilkada 2018 hanya 73.24% dari target 77.5%. Temuan ini langsung relevan bagi penelitian ini dalam hal pendekatan tipologis dan lokus geografis yang berdekatan; perbedaannya adalah penelitian ini memperluas cakupan ke Kota Bogor dan menggunakan analisis kluster berbasis akses media informasi digital.

Di tingkat nasional, Hunawa & Polinggapo, (2025) mengidentifikasi dua tipologi pemilih muda pada Pemilu 2024, yakni *rational voters* yang mengandalkan informasi kebijakan dari media arus utama yang terverifikasi, serta *emotional voters* yang lebih dipengaruhi narasi emosional di media sosial, menegaskan bahwa media digital tidak menghasilkan efek homogen terhadap perilaku politik warga.

Penelitian lainnya yaitu Bramasta dan Pierewan (2023) dalam artikel berjudul "Intensitas Akses Media Digital dan Partisipasi Politik di Indonesia: Data WVS7 2018" menggunakan data World Values Survey Gelombang 7 (n=3.200). Intensitas penggunaan media digital terbukti berpengaruh positif langsung terhadap partisipasi non-konvensional, dengan koefisien jalur pada Pulau Jawa sebesar 0.263 (partisipasi konvensional) dan 0.349 (partisipasi non-konvensional). Penelitian ini memberikan landasan empiris skala nasional bagi penelitian ini untuk mendalaminya pada level lokal Bogor dengan pendekatan

analisis kluster.

Dalam artikel berjudul "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Z di Pedesaan pada Pemilu Tahun 2024", mengkaji peran Instagram, Tiktok, dan Whatsapp dalam meningkatkan kesadaran politik Generasi Z di pedesaan, dengan 91% responden mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi politik. Penelitian ini relevan sebagai kontras empiris: sementara Zainudin (2024) mengkaji konteks pedesaan dengan ketergantungan tinggi pada media sosial, penelitian ini mengkaji konteks urban-periurban Bogor dengan heterogenitas akses dan literasi digital yang lebih tinggi, memperkuat argumen bahwa tipologi partisipasi tidak dapat digeneralisasi secara geografis.

Rohendi dan Muzzammil (2021) mengkaji tipe-tipe pemilih pemula dalam Pilkada Jawa Barat 2018 dan menemukan bahwa pemilih pemula Kabupaten Purwakarta cenderung bertipe rasional. Penelitian ini relevan karena menggunakan pendekatan tipologis dalam konteks elektoral Jawa Barat yang bersinggungan dengan cakupan penelitian ini; perbedaannya adalah penelitian ini membangun tipologi berdasarkan akses media informasi digital dan menggunakan analisis kluster sebagai metode utama.

Ridha dan Riwanda (2020) dalam artikel berjudul "Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital" menggunakan pendekatan kuantitatif *ex post facto* dengan sampel 350 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi media (koefisien 0.567) dan literasi politik (koefisien 0.664) secara signifikan memengaruhi partisipasi kewarganegaraan, dengan pengaruh simultan sebesar 0.689. Temuan ini menjadi landasan teoretis penting bagi penelitian ini dalam membangun indikator literasi informasi digital, sekaligus menegaskan bahwa literasi digital adalah mediator kritis antara akses media dan partisipasi politik aktif.

Dalam literatur internasional, pendekatan tipologi partisipasi politik telah mapan digunakan, dengan warga diklasifikasikan ke dalam kluster seperti *active participants*, *standby citizens*, dan *disengaged citizens*, berdasarkan kombinasi tingkat keterlibatan, motivasi, dan akses informasi politik. Namun kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan di negara maju dan jarang mengintegrasikan dimensi akses media digital secara eksplisit pada level lokal negara berkembang (Fu et al., 2016; Oser, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat *research gap* yang jelas dalam studi partisipasi politik di Indonesia. Pertama, penelitian yang mengkaji hubungan antara akses media informasi digital dan partisipasi politik masih cenderung bersifat parsial dan deskriptif. Kedua, pendekatan tipologi berbasis analisis kluster yang mengintegrasikan variabel akses media digital dan bentuk-bentuk partisipasi politik masih relatif terbatas, khususnya pada level kabupaten/kota. Ketiga, kajian yang secara komparatif menganalisis wilayah urban dan periurban dalam satu konteks regional yang sama masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan pendekatan tipologi partisipasi politik berbasis analisis kluster yang mengintegrasikan akses media informasi digital dalam konteks lokal Kota dan

Kabupaten Bogor. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan pemetaan segmentasi partisipasi politik secara empiris dan kontekstual, sehingga dapat mengungkap variasi pola keterlibatan politik yang selama ini tersembunyi di balik angka partisipasi agregat (Syamsu et al., 2025).

Dalam rangka memahami fenomena tersebut secara sistematis, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka konseptual utama, yaitu tipologi dan segmentasi partisipasi politik, partisipasi politik, serta akses media informasi digital. Pertama, konsep tipologi dan segmentasi partisipasi politik mengacu pada pendekatan person-centered yang digunakan untuk mengklasifikasikan warga ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan pola keterlibatan politik mereka. Fu et al. (2016) mengembangkan tipologi partisipasi warga muda yang membedakan antara active participants, standby citizens, dan disengaged citizens berdasarkan kombinasi aktivitas politik daring dan luring. Indikator yang digunakan untuk membangun tipologi ini meliputi frekuensi partisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan politik (baik konvensional maupun digital), tingkat minat politik, serta pola penggunaan sumber informasi politik. Pendekatan tipologis ini memungkinkan pemetaan segmentasi partisipasi yang lebih akurat dibandingkan analisis agregat yang menyembunyikan variasi antarindividu (Oser, 2017).

Kedua, partisipasi politik dipahami sebagai serangkaian Tindakan sukarela yang dilakukan warga untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik melalui saluran formal maupun informal (Verba et al., 1995 dalam Jeroense & Spierings, 2023). Dalam konteks penelitian ini, partisipasi politik dioperasionalkan melalui tiga indikator utama: (1) aktivitas politik berbasis daring (online), meliputi berbagi informasi politik di media sosial, mengikuti diskusi politik digital, dan menandatangani petisi elektronik; (2) aktivitas politik konvensional (luring/offline), seperti menghadiri kampanye, menggunakan hak pilih, dan berpartisipasi dalam forum musyawarah; serta (3) minat politik, yaitu tingkat ketertarikan dan kepedulian individu terhadap isu-isu politik dan proses demokrasi (Jeroense & Spierings, 2023). Ketiga indikator ini mencerminkan dimensi partisipasi yang bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada satu bentuk keterlibatan.

Ketiga, akses media informasi digital didefinisikan sebagai kemampuan dan intensitas individu dalam mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan berbagai platform media digital sebagai sumber informasi politik (Van Dijk, 2019). Konsep ini melampaui sekadar kepemilikan perangkat atau koneksi internet, melainkan mencakup kedalaman penggunaan yang berdampak pada kapasitas politik warga. Dalam penelitian ini, akses media informasi digital diukur melalui dua indikator utama: (1) intensitas akses media informasi digital, yaitu seberapa sering dan seberapa banyak individu mengonsumsi informasi politik melalui berbagai kanal digital seperti media sosial, portal berita daring, aplikasi pesan instan, dan situs web resmi pemerintah atau lembaga pemilu; serta (2) literasi informasi digital, yaitu kemampuan individu untuk mencari, memilah, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis untuk kepentingan politik (Deursen, 2020). Dua

indikator ini mencerminkan kerangka multi-level digital divide Van Dijk (2019) yang menegaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan akses teknis, tetapi juga mencakup perbedaan kemampuan dalam pemanfaatan informasi secara bermakna.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh akses media informasi digital terhadap tingkat dan bentuk partisipasi politik di kedua wilayah tersebut; (2) menganalisis perbandingan keterpaparan dan penggunaan media informasi digital antara Kota dan Kabupaten Bogor; serta (3) mengidentifikasi dan menganalisis tipologi partisipasi politik berdasarkan akses media informasi digital di Kota dan Kabupaten Bogor dengan menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akademik mengenai partisipasi politik digital di Indonesia, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan komunikasi politik, literasi digital, dan strategi peningkatan partisipasi politik di tingkat local.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain survei cross-sectional. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pemetaan pola akses media informasi digital dan partisipasi politik pada populasi yang besar secara sistematis (Itua & Monday, 2025), sekaligus mengadaptasi kerangka klasifikasi partisipasi politik yang dikembangkan oleh Fu et al. (2016).

Populasi penelitian adalah seluruh penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 di Kota dan Kabupaten Bogor, berjumlah 4.741.329 orang. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dengan rumus yang digunakan adalah

$$n = \frac{Z^2 \times P(1 - P)}{d^2},$$

dengan tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1.96$), proporsi maksimum yang diasumsikan sebesar 50% ($P = 0.5$), dan margin of error sebesar 5% ($d = 0.05$), sehingga diperoleh sampel minimal 385 responden (Nanjundeswaraswamy & Divakar, 2021). Penelitian ini berhasil menghimpun 404 responden yang didistribusikan secara proporsional antara Kota Bogor ($n = 194$) dan Kabupaten Bogor ($n = 210$).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan pendekatan *convenience sampling*, yang dipandang memadai untuk tujuan penelitian yang bersifat eksploratif-tipologis (Lehdonvirta et al., 2020; Zack et al., 2019). Pemilihan teknik ini juga didasarkan pada pertimbangan operasional, mengingat penerapan *stratified sampling* atau *random sampling* memerlukan kerangka sampel yang lengkap serta prosedur penarikan sampel yang lebih kompleks. Konsekuensinya, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh populasi, melainkan untuk menghasilkan tipologi partisipasi yang bersifat analitis dan eksploratif.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode *hybrid*, yakni kombinasi survei daring dan tatap muka, untuk meminimalkan bias akibat ketimpangan akses internet antara

kedua wilayah (Ahrar & Staub, 2025). Instrumen yang digunakan berupa kuesioner terstruktur yang mengukur dua variabel utama: Akses Media Informasi Digital (X) sebagai variabel bebas, diukur dengan skala Likert 8 poin (1 = Sangat Tidak Pernah; 8 = Sangat Sering) melalui indikator intensitas akses dan literasi informasi digital (Deursen, 2020); serta Partisipasi Politik (Y) sebagai variabel terikat, diukur dengan skala 4 poin (1 = Tidak Pernah; 4 = Selalu) melalui indikator aktivitas politik *online*, aktivitas politik konvensional (*offline*), dan minat politik (Jeroense & Spierings, 2023). Kuesioner telah divalidasi melalui *expert judgment* dan *pilot testing* (n = 30), dan menunjukkan validitas (rata-rata r hitung: X = 0.55; Y = 0.60; r table = 0.098) serta reliabilitas yang baik (Cronbach's Alpha = 0.863).

Selain dua variabel utama tersebut, penelitian ini juga memasukkan pengetahuan politik sebagai variabel pembentuk kluster dalam analisis K-Means, pengetahuan politik didefinisikan sebagai Tingkat pemahaman individu terhadap fakta, aktor, lembaga, prosedur, dan isu politik yang berkaitan dengan proses demokrasi dan pemilu. Variabel ini diukur melalui indikator pengetahuan tentang lembaga politik dan pemerintahan, pemilu dan prosedur politik, aktor atau isu politik, serta kemampuan mengenali informasi politik yang benar (Rapeli, 2022; Zetra & Marisa, 2022). Skor pengetahuan politik diperoleh dari jawaban responden pada item kuesioner dan dijumlahkan menjadi skor komposit yang digunakan dalam analisis kluster.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui empat tahap: (1) analisis deskriptif untuk menggambarkan distribusi variabel; (2) regresi linier sederhana dan korelasi *Spearman's Rho* untuk menguji pengaruh dan kekuatan hubungan antara akses media digital dan partisipasi politik, Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan Z-Score sebagai bentuk standarisasi kedua variabel sebelum dimasukkan ke dalam model. Standarisasi ini diperlukan karena variabel Akses Media Informasi Digital diukur dengan skala Likert 8 poin, sementara variabel Partisipasi Politik diukur dengan skala 4 poin, sehingga keduanya memiliki rentang nilai yang tidak sebanding. Melalui transformasi Z-Score, seluruh variabel disesuaikan ke dalam satuan standar deviasi yang setara, sehingga koefisien regresi yang dihasilkan dapat langsung dibaca sebagai koefisien beta terstandarisasi (β) dan digunakan sebagai estimasi ukuran efek yang valid ketika variabel-variabel diukur dalam satuan yang berbeda (Nieminen, 2022); (3) uji *Mann-Whitney U* untuk membandingkan akses media informasi digital dan partisipasi politik antara Kota dan Kabupaten Bogor; serta (4) analisis *K-Means Clustering* (K=3) untuk mengidentifikasi tipologi partisipasi politik berbasis akses media informasi digital, mengacu pada kerangka *active participants*, *standby citizens*, dan *disengaged citizens* dari Fu et al. (2016). Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, termasuk pemberian *informed consent* dan perlindungan kerahasiaan data pribadi responden (Bamdad & Johns, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Bedasarkan Tabel 3, sampel penelitian (n = 202) menunjukkan heterogenitas yang memadai untuk analisis tipologi. Responden didominasi kelompok usia 17–25 tahun (41.1%), berjenis kelamin perempuan (54.7%), berdomisili hampir merata antara Kabupaten Bogor (52.0%) dan Kota Bogor (48.0%), berpendidikan SLTA (53.2%), berprofesi sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai (33.9%) dan Mahasiswa (28.0%), serta berpenghasilan Rp3,5–15 Juta per bulan (42.8%). Profil ini mencerminkan heterogenitas sosial ekonomi yang khas pada wilayah urban-periurban Bogor dan memberikan basis yang memadai untuk analisis tipologi partisipasi politik.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	N	%
Usia	17 – 25 tahun	166	41.1%
	26 – 35 tahun	87	21.5%
	36 – 45 tahun	97	24.0%
	46 – 55 tahun	41	10.1%
	56 tahun ke atas	13	3.2 %
	Total	404	100.0%
Jenis Kelamin	Laki-laki	183	45.3%
	Perempuan	221	54.7%
	Total	404	100.0%
Domisili	Kota Bogor	194	48.0%
	Kabupaten Bogor	210	52.0%
	Total	404	100.0%
Pendidikan Terakhir	Tidak Sekolah	1	0.2%
	Sekolah Dasar (SD)	13	3.2%
	SLTP atau sederajat	6	1.5%
	SLTA atau sederajat	215	53.2%
	Diploma / Vokasi	55	13.6%
	Sarjana (S1)	104	25.7%
	Pasca Sarjana (S2 dan S3)	10	2.5%
	Total	404	100.0%
Pekerjaan	Mahasiswa	113	28.0%
	Belum/Tidak Bekerja	10	2.5%
	Pensiunan	3	0.7%
	Ibu Rumah Tangga	70	17.3%
	Berusaha Sendiri	26	6.4%
	Berusaha Dibantu Buruh	3	0.7%
	Tidak Tetap		
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar	16	4.0%
	Buruh/Karyawan/Pegawai	137	33.9%
	Pekerja Bebas di Pertanian	8	2.0%
Penghasilan per Bulan	Pekerja Bebas di Non-Pertanian	18	4.5%
	Total	404	100.0%

Variabel	Kategori	N	%
Status Pernikahan	Kurang dari Rp550.000	57	14.1%
	Rp550.000 – Rp1,2 Juta	62	15.3%
	Rp1,2 Juta – Rp3,5 Juta	80	19.8%
	Rp3,5 Juta – Rp15 Juta	173	42.8%
	Lebih dari Rp15 Juta	32	7.9%
	Total	404	100.0%
Status Pernikahan	Belum Menikah	179	44.3%
	Menikah	222	55.0%

Tabel 4. Analisis Deskriptif Variabel

	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Variance Statistic
				Statistic	Std. Error		
PARTISIPASI POLITIK	48	0	48	9.81	.395	7.939	63.032
AKSES	66	14	80	45.69	.575	11.560	133.639
Valid N (listwise)							

Berdasarkan Tabel 4, variable Akses Media Informasi Digital memiliki rentang skor antara 14 hingga 80 dengan nilai rata-rata 45.69 ($SD = 11.560$). Nilai rata-rata tersebut mencerminkan bahwa Tingkat capaian akses media informasi digital responden berada pada sekitar 57.1% dari skor maksimal yang mungkin dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh responden memiliki setidaknya tingkat akses media minimal, tidak ada responden dengan skor nol yang mencerminkan penetrasi akses media informasi digital yang sudah cukup merata di kalangan Masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor. Temuan ini sejalan dengan data APJII (2024) yang mencatat tingkat penetrasi internet di Jawa Barat mencapai 82.73% pada tahun 2024, menjadikannya salah satu provinsi dengan adopsi teknologi digital tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, variabel Partisipasi Politik memiliki rentang skor yang lebih lebar, yakni antara 0 hingga 48 dengan nilai rata-rata sebesar 9.81 ($SD = 7.939$). Nilai rata-rata ini hanya mencapai sekitar 20.4% dari skor maksimal yang mungkin, mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Lebih signifikan lagi, adanya responden dengan skor partisipasi 0 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas politik apapun, baik secara *online* maupun *offline*. Kondisi ini konsisten dengan temuan Anggraeni et al (2025) yang mengidentifikasi adanya penurunan partisipasi politik pada Pilkada 2024 di Kota dan Kabupaten Bogor, yang dikaitkan dengan fragmentasi sumber informasi politik dan ketimpangan aksesibilitas media.

Kesenjangan yang mencolok antara tingkat akses media (57.1%) dan tingkat partisipasi politik (20.4%) ini menjadi temuan deskriptif yang penting. Kondisi ini mengonfirmasi argumen Van Dijk (2019) bahwa akses teknis terhadap media digital tidak secara otomatis menghasilkan keterlibatan politik yang aktif, karena terdapat lapisan kesenjangan yang lebih dalam terkait kemampuan pemanfaatan dan motivasi politik warga. Standar deviasi

Variabel	Kategori	N	%
Duda / Janda	Duda / Janda	3	0.7%
	Total	404	100.0%

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan distribusi dan karakteristik masing-masing variabel utama penelitian sebelum masuk ke tahap analisis inferensial. Gambar 1 menyajikan statistik deskriptif dari dua variabel utama penelitian, yaitu variable Akses Media Informasi Digital dan variable Partisipasi Politik, berdasarkan skor mentah responden.

variabel Akses Media (11.560) yang lebih besar dibandingkan Partisipasi Politik (7.939) juga mengindikasikan bahwa variasi akses media antar responden lebih beragam, yang mencerminkan heterogenitas infrastruktur dan kebiasaan konsumsi media diantara masyarakat urban dan periurban di wilayah Bogor (Hadi, 2018).

Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk menguji Hipotesis 2 (H2), yakni apakah akses media informasi digital berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor. Variabel bebas yang digunakan adalah Zscore Akses Media Informasi Digital (X), sedangkan variabel terikat adalah Zscore Partisipasi Politik (Y). Hasil analisis disajikan pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji F (ANOVA Regresi)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	48.970	1	48.970	55.605	< 0.001
Residual	354.030	402	0.881		
Total	403.000	403			

Tabel 6. Model Summary Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 ^a	.122	.119	.93844102

Tabel 7. Koefisien Regresi

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	7.432E-16	0.047	–	0.000	1.000
Zscore: Akses Media Digital	0.349	0.047	0.349	7.457	< 0.001

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis menunjukkan nilai F sebesar signifikansi < 0.001, yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Nilai *R Square* sebesar 0.122 seperti yang terlihat pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sekitar 12.2% variasi partisipasi politik dapat dijelaskan oleh variasi akses media informasi digital, sedangkan 87.8%

sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai *R Square* yang relatif kecil ini merupakan hal yang umum dan dapat diterima dalam penelitian ilmu sosial, mengingat fenomena partisipasi politik merupakan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks, termasuk kepercayaan politik, ketertarikan terhadap isu politik, serta faktor sosiologis dan psikologis lainnya (Jeroense & Spierings, 2023).

Bedasarkan Tabel 7, nilai koefisien regresi tidak terstandarisasi (B) sebesar 0.349 dengan nilai t sebesar 7.457 dan signifikansi < 0.001 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan score akses media informasi digital akan diikuti oleh peningkatan partisipasi politik sebesar 0.349 satuan. Arah pengaruh yang positif ini konsisten dengan temuan Bramasta dan Pierewan (2023).

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variable bersifat positif dan proporsional, di mana peningkatan akses media berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi politik responden. Temuan ini mendukung penerimaan H2 bahwa akses media informasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik. Namun demikian, nilai *R Square* sebesar 12.2% mengisyaratkan bahwa akses media saja tidak cukup untuk mendorong partisipasi politik secara substansial. Hal ini sejalan dengan argumen Ridha dan Riwanda (2020) yang menekankan bahwa literasi media dan literasi politik merupakan mediator kritis antara akses media dan partisipasi aktif warga, dengan koefisien pengaruh literasi media terhadap partisipasi kewarganegaraan mencapai 0.567. Dengan demikian, peningkatan akses media informasi digital perlu dibarengi dengan penguatan literasi digital dan minat politik agar dapat menghasilkan partisipasi politik yang lebih bermakna dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Untuk memperkuat analisis pengaruh, dilakukan uji korelasi *Spearman's Rho* mengingat distribusi data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel Akses Media Informasi Digital dan Partisipasi Politik secara non-parametrik. Hasil uji korelasi disajikan pada table 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Korelasi Spearman's Rho

		Partisipasi Politik	Akses
Spearman's Rho	Correlation Coefficient	1.000	.320**
	Sig. (2 Tailed)		<.001
	N	404	404
	Correlation Coefficient	.320**	1.000
Akses	Sig. (2 Tailed)	<.001	
	N	404	404

Bedasarkan Tabel 8, hasil uji *Spearman's Rho* menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0.320 dengan signifikansi < 0.0001 , yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara akses media informasi digital dan partisipasi politik pada taraf kepercayaan 99% (ditandai dengan tanda bintang ganda **).

Nilai koefisien 0.320 termasuk dalam kategori lemah hingga mendekati sedang, yang berarti peningkatan akses media berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi politik, meskipun kekuatan hubungan tersebut tidak tergolong kuat.

Temuan ini konsisten dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0.122, mengonfirmasi bahwa akses media informasi digital memberikan kontribusi yang nyata namun tidak dominan terhadap partisipasi politik. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa partisipasi politik merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor tunggal semata (Jeroense & Spierings, 2023), sehingga faktor-faktor lain seperti kepercayaan politik, literasi media, dan minat politik turut memainkan peran yang signifikan dalam membentuk perilaku partisipasi warga.

Pengujian hipotesis H3 dan H3a dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney U untuk membandingkan tingkat akses media informasi digital dan partisipasi politik antara Masyarakat Kota Bogor (n = 194) dan Kabupaten Bogor (n = 210). Uji non-parametrik ini dipilih sebagai pengganti Independent Sample T-Test karena distribusi data tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil Uji disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10 berikut.

Tabel 9. Perbandingan Mean Rank Kota Bogor dan Kabupaten Bogor

Variabel	Domisili	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Partisipasi Politik	1 – Kota Bogor	194	208.47	40444.00
	2 – Kabupaten Bogor	210	196.98	41366.00
	Total	404		
Akses Media Digital	1 – Kota Bogor	194	201.28	39048.50
	2 – Kabupaten Bogor	210	203.63	42761.50
	Total	404		

Tabel 10. Test Statistics Uji Mann-Whitney U

Statistik	Partisipasi Politik	Akses Media Digital
Mann-Whitney U	19211.000	20133.500
Wilcoxon W	41366.000	39048.500
Z	-0.992	-0.202
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.321	0.840

Bedasarkan Tabel 9 dan Tabel 10, hasil uji Mann-Whitney U menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses media informasi digital antara Kota dan Kabupaten Bogor (U = 20.133,500; Z = -0.202; Sig. = 0.840), maupun dalam tingkat partisipasi politik (U = 19211.000; Z = -0.992; Sig. = 0.321). Kedua nilai signifikansi tersebut berada jauh di atas batas 0.05, sehingga hipotesis H3 dan H3a secara statistik ditolak.

Meskipun secara deskriptif Mean Rank Kota Bogor sedikit lebih tinggi pada partisipasi (208.47 vs 196.98) dan Kabupaten Bogor pada akses media (203.63 vs 201.28), perbedaan tersebut tidak bermakna secara statistik, mengindikasikan bahwa batas geografis urban-periurban tidak lagi menjadi faktor pembeda yang signifikan.

Hasil ini dapat dijelaskan oleh semakin meratanya

penetrasi internet di Jawa Barat yang mencapai 82.73% pada tahun 2024 (APJII, 2024), sehingga kesenjangan digital antara Kota dan Kabupaten Bogor semakin mengecil. Karakteristik periurban Kabupaten Bogor yang memiliki tingkat adopsi teknologi digital yang tidak jauh berbeda dari wilayah perkotaan (Hadi, 2018) turut berkontribusi pada kesetaraan pola akses dan partisipasi politik di antara kedua wilayah tersebut. Penolakan H3 dan H3a ini bukan merupakan kegagalan penelitian, melainkan justru menjadi temuan empiris yang penting bahwa di era penetrasi digital yang semakin massif, homogenisasi perilaku politik digital lintas batas geografis urban dan-periurban meulai terbentuk, sejalan dengan argumen Boulianne (2018) bahwa media digital memperluas ruang partisipasi melampaui batas-batas demografis dan geografis tradisional.

Analisis K-Means Clustering dilakukan untuk menguji H1 dan H1a, yakni apakah terdapat lebih dari satu tipologi partisipasi politik masyarakat berdasarkan akses media informasi digital, serta apakah tipologi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kluster partisipasi tinggi, sedang, dan rendah. Analisis ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu Partisipasi Politik, Akses Media Informasi Digital, dan Pengetahuan Politik, dengan jumlah kluster yang ditetapkan sebesar tiga ($K=3$).

Penetapan jumlah kluster sebesar tiga didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, secara teoretis, Fu et al. (2016) mengklasifikasikan warga ke dalam tiga tipologi partisipasi berdasarkan kombinasi keterlibatan online dan offline, yaitu *active participants*, *standby citizens*, dan *disengaged citizens*. Kedua, secara empiris, rumusan Hipotesis 1a penelitian ini secara eksplisit menyebutkan tiga tingkatan partisipasi yaitu tinggi, sedang, dan rendah yang menjadi landasan penentuan jumlah kluster. Pendekatan ini sejalan dengan praktik penelitian tipologi partisipasi politik yang telah mapan dalam literatur lintas negara (Oser et al., 2022).

Proses K-Means dimulai dengan penetapan titik awal (*initial cluster centers*) yang ditentukan secara otomatis oleh SPSS berdasarkan jarak maksimum antar observasi. Tabel 11 menyajikan nilai pusat kluster awal sebelum proses iterasi dilakukan.

Tabel 11. Initial Cluster Centers

Variabel	Kluster 1	Kluster 2	Kluster 3
Partisipasi Politik	48	2	4
Akses Media Digital	73	66	14
Pengetahuan Politik	6	3	7

Bedasarkan Tabel 11, titik awal ketiga kluster sudah menunjukkan perbedaan yang cukup jelas pada variable Partisipasi Politik, yakni Kluster 1 dimulai dari skor tinggi (48), Kluster 2 dari skor sangat rendah (2), dan Kluster 3 dari skor rendah (4). Sementara pada variable Akses Media, Kluster 1 dan 2 dimulai dari skor yang berdekatan (73 dan 66), sedangkan Kluster 3 dimulai jauh lebih rendah (14). Konfigurasi titik awal ini menjadi fondasi bagi proses iterasi untuk menemukan pengelompokan yang paling optimal.

Proses iterasi K-Means berjalan sebanyak 12 kali

hingga mencapai konvergensi. Tabel 12 menyajikan ringkasan perubahan pusat kluster pada iterasi kunci.

Tabel 12. Ringkasan Iteration History

Iteration	Perubaha n K1	Perubaha n K2	Perubahan K3	Status
1	17.456	17.323	17.320	Berjalan
6	0.914	0.205	0.000	Berjalan
9	0.000	0.122	0.249	Mendekati
12	0.000	0.000	0.000	Konvergen

Konvergensi tercapai pada iterasi ke-12, ditandai dengan nilai perubahan pusat kluster sebesar 0.000 pada ketiga kluster secara simultan ("*Convergence achieved due to no or small change in cluster centers*"). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelompokan yang dihasilkan telah stabil dan tidak akan berubah pada iterasi selanjutnya, sehingga hasil analisis dapat dinyatakan valid dan dapat diandalkan untuk interpretasi lebih lanjut.

Mengingat K-Means sensitif terhadap inisialisasi, uji stabilitas dilakukan melalui multi-start initialization (10 kali dengan random seed berbeda) dan split-sample validation (60%/40%). Pada kedua pendekatan, profil tipologi yang dihasilkan konsisten: kelompok akses dan partisipasi tinggi, sedang, dan rendah. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa solusi tiga kluster mencerminkan struktur laten yang nyata dalam data, bukan artefak inisialisasi (Oser et al., 2022).

Setelah proses iterasi selesai, diperoleh pusat kluster akhir (*final cluster centers*) yang merepresentasikan nilai rata-rata masing-masing variabel pada setiap kluster. Tabel 13 menyajikan profil akhir ketiga kluster yang terbentuk.

Tabel 13. Final Cluster Centers

Variabel	Kluster 1 (Aktif)	Kluster 2 (Moderat)	Kluster 3 (Pasif)
Partisipasi Politik	24	8	6
Akses Media Digital	57	50	31
Pengetahuan Politik	6	6	5

Berdasarkan Tabel 13, ketiga kluster menunjukkan profil yang berbeda secara substansial: Kluster 1 dengan partisipasi tertinggi (24) dan akses media tertinggi (57); Kluster 2 pada posisi tengah (partisipasi 8, akses 50); serta Kluster 3 dengan profil terendah (partisipasi 6, akses 31).

Pola yang terbentuk ini sangat konsisten dengan kerangka tipologi yang dikembangkan Fu et al. (2016), di mana Kluster 1 bersesuaian dengan *active participants* yang secara aktif memanfaatkan media untuk terlibat dalam politik, Kluster 2 bersesuaian dengan *standby citizens* yang memiliki kapasitas namun belum termobilisasi secara penuh, dan Kluster 3 bersesuaian dengan *disengaged citizens* yang cenderung apolitis dan memiliki akses media terbatas. Temuan ini juga konsisten dengan konfigurasi pemilih yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam data penelitian, di mana kategori *Alienasi* yang muncul dari analisis data awal berkorespondensi dengan profil Kluster 3.

Setelah kluster terbentuk secara stabil, setiap responden diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kluster berdasarkan kedekatan karakteristiknya terhadap pusat kluster

final. Tabel 14 menyajikan distribusi jumlah responden pada masing-masing kluster.

Tabel 14. Distribusi Jumlah Responden per Kluster

Kluster	Tipologi	N	Persentase (%)
1	Partisipan Aktif	56	13.9%
2	Partisipan Moderat	236	58.4%
3	Partisipan Pasif	112	27.7%
Total	Valid	404	100%

Berdasarkan Tabel 14, Partisipan Moderat mendominasi dengan 236 responden (58.4%), diikuti Partisipan Pasif 112 responden (27.7%), dan Partisipan Aktif hanya 56 responden (13.9%).

Dominasi Partisipan Moderat (58.4%) mengindikasikan potensi peningkatan partisipasi yang besar: mereka sudah memiliki akses media yang cukup namun belum termobilisasi secara optimal, konsisten dengan konsep standby citizens Fu et al. (2016).

Hampir sepertiga responden (27.7%) pada kluster 3 merupakan kelompok paling rentan, sementara hanya 13.9% yang berhasil mengonversi akses media menjadi partisipasi aktif. Ini menegaskan bahwa perluasan akses saja tidak cukup, diperlukan intervensi terstruktur untuk mengonversi kelompok Moderat menjadi Aktif (Ridha & Riwanda, 2020).

Validitas pemisahan antar kluster dapat dinilai dari jarak euclidean antar pusat kluster akhir. Semakin besar jarak antar kluster, semakin distinct perbedaan antar kelompok yang terbentuk. Tabel 15 menyajikan jarak antar pusat kluster final.

Tabel 15. Distances Between Final Cluster Centers

Kluster	1	2	3
1	–	17.165	31.438
2	17.165	–	19.170
3	31.438	19.170	–

Berdasarkan Tabel 15, jarak terbesar terjadi antara Klaster 1 dan Klaster 3 (31.438), mengonfirmasi kontras tertajam antara Partisipan Aktif dan Pasif. Klaster 2 berada di posisi tengah (17.165 dari K1, 19.170 dari K3). Jarak substansial ini membuktikan discriminant validity tipologi yang terbentuk

Untuk mengetahui variabel mana yang paling kuat membedakan ketiga kluster, dilakukan uji ANOVA pada hasil K-Means. Perlu dicatat bahwa uji F dalam konteks K-Means bersifat deskriptif dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai uji signifikansi hipotesis secara langsung, karena kluster telah dipilih untuk memaksimalkan perbedaan antar kelompok (SPSS, 2025). Tabel 16 menyajikan hasil ANOVA tersebut.

Tabel 16. Kekuatan Pembeda Variabel Antar Kluster

Variabel	Cluster MS	df	Error MS	df	F	Sig.
Partisipasi Politik	6534.719	2	30.754	401	212.485	<.001
Akses Media Digital	17927.465	2	44.892	401	399.345	<.001
Pengetahuan Politik	51.006	2	1.519	401	33.590	<.001

Berdasarkan Tabel 16, ketiga variabel secara signifikan membedakan kluster (Sig. < 0.001). Akses Media Digital memiliki nilai F tertinggi (399.345), jauh di atas Partisipasi Politik (212.485) dan Pengetahuan Politik (33.590), menegaskan bahwa akses media merupakan dimensi paling tajam dalam memisahkan ketiga tipologi.

Tingginya nilai F Akses Media memperkuat kerangka digital divide Van Dijk (2019). Tipologo partisipasi lebih ditentukan oleh seberapa banyak responden mengakses media digital daripada seberapa aktif mereka berpartisipasi secara langsung.

Berdasarkan seluruh hasil analisis K-Means yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tipologi partisipasi politik yang berbeda di kalangan masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor. Tabel 17 menyajikan ringkasan profil ketiga tipologi tersebut.

Tabel 17. Ringkasan Tipologi Partisipasi Politik

Kluster	Tipologi	Partisipasi	Akses Media	Pengetahuan	Jarak ke K-lain
1	Partisipan Aktif	24 (Tinggi)	57 (Tinggi)	6 (Tinggi)	17,165 – 31,438
2	Partisipan Moderat	8 (Sedang)	50 (Sedang)	6 (Sedang)	17,165 – 19,170
3	Partisipan Pasif	6 (Rendah)	31 (Rendah)	5 (Rendah)	19,170 – 31,438

Partisipan Aktif (Klaster 1) memiliki skor partisipasi tertinggi (24) dan akses media tertinggi (57), merepresentasikan warga yang secara aktif memanfaatkan media digital untuk terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, sesuai dengan active participants dalam kerangka Fu et al. (2016).

Partisipan Moderat (Klaster 2) memiliki akses media menengah (50) dan partisipasi sedang (8). Kelompok ini berkorespondensi dengan standby citizens Fu et al. (2016): memiliki kapasitas namun belum termobilisasi kecuali pada momentum tertentu seperti pemilihan umum.

Partisipan Pasif (Klaster 3) memiliki partisipasi terendah (6) dan akses media paling terbatas (31), mencerminkan dampak third-level digital divide Van Dijk (2019): keterbatasan akses media berujung pada minimnya pemanfaatan politik teknologi digital.

Berdasarkan hasil analisis, H1 diterima: terbentuk tiga tipologi yang berbeda secara substansial dengan jarak antar kluster yang memadai sebagai bukti discriminant validity. H1a juga diterima: ketiga kluster menunjukkan hierarki partisipasi tinggi (K1), sedang (K2), dan rendah (K3) yang sepenuhnya sesuai rumusan hipotesis, memvalidasi pendekatan person-centered berbasis analisis kluster (Oser, 2017).

Kedua, H1a yang menyatakan bahwa tipologi partisipasi politik dapat dikelompokkan ke dalam kluster partisipasi tinggi, sedang, dan rendah diterima. Ketiga kluster yang terbukti menunjukkan hierarki yang jelas. Klaster 1 (Partisipan Aktif) dengan partisipasi tinggi, Klaster 2 (Partisipan Moderat) dengan partisipasi sedang, dan Klaster 3 (Partisipan Pasif) dengan partisipasi rendah yang sepenuhnya

sesuai dengan rumusan hipotesis tersebut. Keberhasilan analisis tipologi ini menegaskan bahwa pendekatan *person-centered* berbasis analisis klaster merupakan metode yang tepat untuk mengungkap variasi partisipasi politik yang tersembunyi di balik angka agregat, sebagaimana yang diadvokasikan oleh Oser (2017) dalam pengembangan kerangka pengukuran partisipasi berbasis tipologi.

Untuk memperkuat validitas eksternal tipologi yang terbentuk, dilakukan analisis cross-tabulasi antara keanggotaan klaster dan variabel-variabel demografis utama responden, yaitu usia, tingkat pendidikan, dan domisili. Tujuan analisis ini adalah untuk menguji apakah ketiga tipologi partisipasi menunjukkan pola distribusi demografis yang berbeda dan dapat diprediksi secara teoretis, sehingga membuktikan bahwa tipologi tersebut bukan sekadar artefak statistik melainkan mencerminkan kelompok sosial yang bermakna (Oser, 2017; Fu et al., 2016). Hasil cross-tabulasi disajikan pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Cross-Tabulasi Tipologi Klaster dan Variabel Demografis

Variabel Demografis	K1: Partisipan Aktif (n=56)	K2: Partisipan Moderat (n=236)	K3: Partisipan Pasif (n=112)
Usia			
17 – 25 tahun	18 (32.1%)	98 (41.5%)	50 (44.6%)
26 – 35 tahun	16 (28.6%)	51 (21.6%)	20 (17.9%)
36 – 45 tahun	17 (30.4%)	62 (26.3%)	18 (16.1%)
46 tahun ke atas	5 (8.9%)	25 (10.6%)	24 (21.4%)
Pendidikan Terakhir			
≤ SLTA / sederajat	19 (33.9%)	139 (58.9%)	77 (68.7%)
Diploma / Vokasi	7 (12.5%)	37 (15.7%)	11 (9.8%)
S1 / Pasca Sarjana	30 (53.6%)	60 (25.4%)	24 (21.4%)
Domisili			
Kota Bogor	27 (48.2%)	113 (47.9%)	54 (48.2%)
Kabupaten Bogor	29 (51.8%)	123 (52.1%)	58 (51.8%)

Berdasarkan Tabel 18, cross-tabulasi antara keanggotaan klaster dan variabel demografis menunjukkan pola yang secara keseluruhan mendukung validitas eksternal tipologi yang terbentuk. Dari sisi pendidikan, terdapat gradien yang jelas dan terprediksi secara teoretis: proporsi responden berpendidikan S1/Pasca Sarjana lebih tinggi pada Klaster 1 Partisipan Aktif (53.6%) dibandingkan Klaster 2 (25.4%) maupun Klaster 3 (21.4%). Sebaliknya, proporsi responden berpendidikan SLTA ke bawah semakin besar dari Klaster 1 (33.9%) ke Klaster 2 (58.9%) dan Klaster 3 (68.7%). Pola ini konsisten dengan temuan Verba et al. (dalam Jeroense & Spierings, 2023) bahwa tingkat pendidikan merupakan prediktor kuat partisipasi politik, karena pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan kapasitas literasi informasi yang lebih baik dan

kecenderungan keterlibatan sipil yang lebih tinggi. Dari sisi usia, Klaster 1 Partisipan Aktif menunjukkan proporsi responden usia 26–45 tahun yang lebih tinggi (28.6% + 30.4% = 59.0%) dibandingkan Klaster 3 yang lebih didominasi usia 17–25 tahun (44.6%) dan 46 tahun ke atas (21.4%). Temuan ini mengindikasikan bahwa kelompok usia produktif-dewasa cenderung lebih aktif secara politik, sementara Klaster 3 yang pasif lebih banyak dihuni oleh usia termuda yang belum memiliki pengalaman politik yang cukup dan usia yang lebih tua dengan keterbatasan akses digital. Dari sisi domisili, distribusi Kota vs Kabupaten Bogor pada ketiga kluster hamper merata di angka 48–52%, yang konsisten dengan temuan uji Mann-Whitney bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah (Sig. = 0.840). Hal ini sekaligus memperkuat argumen bahwa tipologi partisipasi lebih ditentukan oleh karakteristik individu (akses media, pendidikan, usia) daripada oleh batas geografis administratif.

Pengaruh Akses Media Informasdi Digital terhadap Partisipasi Politik

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa akses media informasi digital berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor ($B = 0.349$; $F = 55.605$; Sig. < 0.001). Meskipun nilai R^2 sebesar 12.2% menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak dominan, hasil ini tetap penting karena menegaskan adanya hubungan yang nyata dan terarah antara akses media digital dan partisipasi politik. Rendahnya R^2 juga mengindikasikan bahwa pengaruh media digital kemungkinan bekerja secara tidak langsung, misalnya melalui literasi digital, efikasi politik, dan kepercayaan politik, sementara fenomena *slactivism* dan *information overload* dapat menjelaskan mengapa akses yang tinggi tidak selalu menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, akses media digital tetap relevan sebagai prediktor partisipasi politik, tetapi posisinya perlu dipahami dalam kerangka mekanisme yang lebih kompleks.

Arah pengaruh yang positif ini konsisten dengan kesimpulan meta-analisis Boulianne (2018) yang mengkaji dua dekade penelitian mengenai efek media digital terhadap partisipasi sipil dan politik, yang secara keseluruhan menemukan asosiasi positif antara penggunaan media digital dan keterlibatan politik warga. Pada level nasional Indonesia, Bramasta dan Pierewan (2023) menemukan koefisien jalur yang identik (0.349) pada konteks masyarakat Pulau Jawa, menunjukkan konsistensi pola pengaruh ini lintas level analisis, dari nasional hingga lokal Kota dan Kabupaten Bogor. Konsistensi koefisien yang sangat presisi ini memberikan kredibilitas empiris yang tinggi terhadap temuan penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa efek akses media terhadap partisipasi politik memiliki kestabilan yang dapat diandalkan dalam konteks masyarakat Jawa pada umumnya.

Namun demikian, nilai R Square sebesar 12.2% juga membawa pesan penting yang perlu dicermati: akses media informasi digital hanyalah satu dari sekian banyak faktor yang membentuk partisipasi politik. Jeroense dan Spierings (2023) menegaskan bahwa profil partisipasi politik warga terbentuk dari interaksi kompleks antara akses informasi, efikasi politik,

kepercayaan terhadap institusi, dan faktor identitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, 87.8% varians partisipasi yang tidak terjawab oleh model regresi mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap KPU, Bawaslu, dan institusi politik lainnya yang diukur dalam kuesioner penelitian ini, serta ketertarikan terhadap politik secara umum, memiliki kontribusi yang lebih besar secara agregat dibandingkan akses media itu sendiri.

Temuan ini juga merespons langsung paradoks yang diidentifikasi di bagian pendahuluan: penetrasi internet Jawa Barat yang mencapai 82.73% (APJII, 2024) tidak serta menghasilkan partisipasi politik yang tinggi, sebagaimana tercermin dari penurunan partisipasi pada Pilkada 2024 menjadi 68.1% (Arini, 2024). Lorenz-Spreen et al. (2023) dalam kajian sistematis mereka menemukan bahwa efek media digital terhadap demokrasi bersifat ambigu: di satu sisi memperluas akses informasi dan mobilisasi, namun di sisi lain juga menghasilkan fragmentasi informasi dan penarikan diri dari proses politik formal. Penelitian ini memberikan bukti empiris level lokal yang mengonfirmasi ambiguitas tersebut, di mana akses media yang tinggi (rata-rata 57.1% dari skor maksimal) tidak berhasil mendorong partisipasi politik yang proporsional (hanya 20.4% dari skor maksimal).

Implikasi praktis dari temuan ini mengarah pada pentingnya pendekatan yang melampaui sekadar perluasan akses. Ridha dan Riwarda (2020) menunjukkan bahwa literasi media memiliki koefisien pengaruh yang jauh lebih besar terhadap partisipasi kewarganegaraan (0.567) dibandingkan akses semata. Dengan demikian, strategi peningkatan partisipasi politik di Kota dan Kabupaten Bogor perlu mengintegrasikan program penguatan literasi digital dan literasi politik, tidak hanya berfokus pada perluasan infrastruktur dan akses teknologi. Temuan ini juga memberikan masukan bagi para penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kota dan Kabupaten Bogor, untuk mengembangkan program sosialisasi yang tidak hanya memanfaatkan kanal digital, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan informasi politik secara produktif.

Kekuatan Hubungan antara Akses Media dan Partisipasi Politik

Hasil uji korelasi Spearman's Rho menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.320 (Sig. < 0.001), yang mengindikasikan hubungan positif yang signifikan namun tergolong lemah hingga mendekati sedang antara akses media informasi digital dan partisipasi politik. Kategori kekuatan hubungan ini, meskipun tampak modest, justru mencerminkan realitas empiris yang lebih akurat tentang dinamika partisipasi politik di era digital dibandingkan klaim-klaim optimistik yang menyederhanakan hubungan antara teknologi dan demokrasi.

Kekuatan hubungan yang tidak terlalu kuat ini selaras dengan temuan Oser et al. (2022) dalam meta-analisis multilevel mereka, yang menemukan bahwa hubungan antara efikasi politik, penggunaan media digital, dan partisipasi politik bersifat moderat dan sangat bergantung pada konteks institusional dan sosial di mana warga beroperasi. Dalam konteks Kota dan Kabupaten Bogor, konteks tersebut

mencakup dinamika politik lokal yang spesifik, tingkat kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu, serta polarisasi informasi yang terjadi di ruang digital selama Pilkada 2024.

Korelasi positif yang konsisten ini juga memperkuat argumen bahwa hubungan antara akses media dan partisipasi bukanlah sebuah kebetulan statistik, melainkan mencerminkan mekanisme yang bermakna. Widodo dan Kristiyanto (2025) berargumen bahwa transformasi komunikasi politik Indonesia menuju ekosistem digital menciptakan ruang baru bagi mobilisasi dan deliberasi politik yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem media konvensional. Nilai korelasi 0.320 yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa mekanisme tersebut memang bekerja di level lokal Bogor, meskipun efektifitasnya masih terbatas oleh berbagai faktor mediasi dan moderasi yang tidak diukur dalam model penelitian ini.

Penting untuk dicatat bahwa nilai korelasi 0.320 ini diperoleh dalam konteks di mana data tidak berdistribusi normal, sehingga penggunaan Spearman's Rho sebagai alternatif non-parametrik menjadi pilihan yang metodologis lebih tepat. Konsistensi antara hasil korelasi ($r = 0.320$) dan koefisien regresi terstandarisasi ($\beta = 0.349$) menunjukkan robustitas temuan ini terhadap pilihan metode analisis yang berbeda, dan semakin memperkuat kesimpulan bahwa hubungan positif antara akses media dan partisipasi politik adalah temuan yang dapat diandalkan secara empiris.

Homogenisasi Digital: Tidak Ada Perbedaan Signifikan antara Kota dan Kabupaten Bogor

Salah satu temuan paling mengejutkan sekaligus signifikan dari penelitian ini adalah ditolaknya Hipotesis 3 (H3) dan Hipotesis 3a (H3a): tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor baik dalam hal akses media informasi digital ($U = 20133.500$; Sig. = 0.840) maupun partisipasi politik ($U = 19211.000$; Sig. = 0.321). Temuan ini menantang asumsi konvensional bahwa urbanisasi dan kedekatan dengan pusat kota secara otomatis menghasilkan keunggulan akses digital dan partisipasi politik yang lebih tinggi.

Secara teoretis, temuan ini dapat dipahami melalui dua lensa analisis yang saling melengkapi. Pertama, dari perspektif infrastruktur digital, penetrasi internet Jawa Barat yang mencapai 82.73% pada tahun 2024 (APJII, 2024) telah menciptakan kondisi di mana kesenjangan akses antarwilayah semakin mengecil. (Boulianne, 2018) berargumen bahwa ketika penetrasi internet telah melampaui ambang tertentu, efek *equalizing* media digital mulai bekerja yakni penyetaraan akses informasi politik lintas batas demografis dan geografis tradisional. Penelitian ini menemukan bukti empiris level lokal yang mendukung argumen tersebut.

Kedua, dari perspektif karakteristik wilayah, (Hadi, 2018) menegaskan bahwa wilayah periurban Indonesia seperti banyak kecamatan di Kabupaten Bogor tidak dapat lagi disamakan dengan wilayah rural dalam hal akses teknologi digital. Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota negara dan berada dalam koridor ekonomi Jabodetabek memiliki tingkat konektivitas digital

yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten periurban di luar Jawa. Konfigurasi ini menjadikan dikotomi urban-periurban sebagai prediktor yang tidak lagi memadai untuk menjelaskan variasi akses digital di era penetrasi internet yang semakin massif.

Temuan ini juga memiliki resonansi dengan penelitian Anggraeni et al. (2025) yang menemukan bahwa pola penurunan partisipasi pada Pilkada 2024 terjadi secara merata di Kota maupun Kabupaten Bogor, tanpa perbedaan yang tajam berdasarkan batas administratif. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang menekan partisipasi politik seperti apatisme, ketidakpercayaan terhadap institusi, dan kelelahan pemilih akibat siklus pemilu yang padat bersifat lintas wilayah dan tidak terbatas pada konteks urban atau periurban tertentu.

Dari sisi metodologis, ditolaknya H3 dan H3a juga memberikan validasi terhadap desain penelitian yang menggunakan pendekatan tipologis berbasis klaster dibandingkan pendekatan komparatif berbasis wilayah. Apabila tidak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah berdasarkan variabel akses dan partisipasi, maka upaya membangun tipologi yang melampaui batas geografis menjadi semakin relevan dan bermakna. Jayawinangun dan Valdiani (2020) dalam penelitian serupa di Kabupaten Bogor menemukan bahwa tipologi partisipasi lebih ditentukan oleh pola penggunaan informasi politik daripada oleh lokasi geografis responden temuan yang selaras dengan hasil penelitian ini.

Tipologi Partisipasi Politik Berbasis Akses Media Informasi Diogital

Temuan terpenting dan paling orisinal dari penelitian ini adalah teridentifikasinya tiga tipologi partisipasi politik yang berbeda secara substansial di kalangan masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor: Partisipan Aktif (Klaster 1), Partisipan Moderat (Klaster 2), dan Partisipan Pasif (Klaster 3). Keberhasilan analisis K-Means dalam membentuk tiga tipologi yang stabil, dibuktikan oleh konvergensi pada iterasi ke-12 dan jarak antar klaster yang substansial (maksimum 31.438) menegaskan diterimanya Hipotesis 1 (H1) dan Hipotesis 1a (H1a).

Tipologi Partisipan Aktif yang dicirikan oleh akses media tinggi (skor 57) dan partisipasi politik tinggi (skor 24) merepresentasikan kelompok warga yang berhasil mengonversi keterpaparan media digital menjadi keterlibatan politik yang konkret. Dalam kerangka Fu et al. (2016), kelompok ini berkorespondensi dengan *active participants* yang menggunakan beragam saluran partisipasi baik online maupun offline secara simultan dan sinergis. Hunawa dan Polinggapo (2025) mengidentifikasi bahwa kelompok serupa dalam konteks Pemilu 2024 Indonesia cenderung merupakan *rational voters* yang mengandalkan verifikasi informasi dari berbagai sumber media sebelum membuat keputusan politik. Implikasi penting dari keberadaan kelompok ini adalah bahwa efek positif akses media terhadap partisipasi memang nyata dan dapat diaktualisasikan, namun hanya pada segmen masyarakat tertentu yang memiliki motivasi dan kapasitas literasi digital yang memadai.

Tipologi Partisipan Moderat yang merupakan kelompok terbesar merepresentasikan kelompok warga yang memiliki akses media cukup baik (skor 50) namun partisipasi politik yang masih terbatas (skor 8). Kelompok ini mencerminkan realitas mayoritas masyarakat digital Indonesia yang dikonseptualisasikan oleh Fu et al. (2016) sebagai *standby citizens* warga yang memiliki kapasitas dan kesadaran politik namun tidak secara konsisten mengaktualisasikannya dalam bentuk partisipasi aktif. Kondisi ini selaras dengan temuan Dwitama et al. (2022) yang menemukan bahwa meskipun media sosial diakui memiliki peran penting dalam memengaruhi partisipasi, konversi kesadaran menjadi tindakan politik konkret masih merupakan tantangan utama, terutama di luar momen elektoral. Kelompok Partisipan Moderat ini merepresentasikan potensi terbesar yang belum dimanfaatkan: dengan intervensi yang tepat seperti program literasi politik berbasis media digital kelompok ini dapat bertransisi menjadi partisipan yang lebih aktif.

Tipologi Partisipan Pasif yang dicirikan oleh akses media paling rendah (skor 31) dan partisipasi politik terendah (skor 6) merepresentasikan kelompok yang paling rentan dalam ekosistem demokrasi digital. Dalam kerangka Van Dijk (2019), kelompok ini mencerminkan dampak kumulatif dari *third-level digital divide*: keterbatasan akses media menghasilkan minimnya pengetahuan politik, yang pada gilirannya menghasilkan apatisme dan keterasingan dari proses demokrasi. Rohendi dan Muzzammil (2021) dalam konteks pemilu muda Jawa Barat menemukan bahwa kelompok dengan akses informasi terbatas cenderung membentuk orientasi yang lebih emosional dan kurang rasional dalam pengambilan keputusan politik, yang berimplikasi pada rendahnya konsistensi partisipasi elektoral. Keberadaan tipologi Partisipan Pasif ini juga berkorespondensi dengan kategori *Alienasi* yang telah teridentifikasi dalam konfigurasi pemilih di data penelitian, mengindikasikan bahwa keterasingan politik bukan hanya fenomena sikap, melainkan juga termanifestasi dalam perilaku partisipasi yang konkret.

Nilai F tertinggi dari variabel Akses Media Digital (399.345) dalam tabel ANOVA K-Means dibandingkan Partisipasi Politik (212.485) dan Pengetahuan Politik (33.590) memberikan temuan teoretis yang signifikan: akses media merupakan faktor yang paling tajam dalam membedakan ketiga tipologi. Ini berarti bahwa tipologi partisipasi yang terbentuk lebih ditentukan oleh seberapa intensif seseorang mengakses informasi politik melalui berbagai kanal media digital, daripada oleh tingkat pengetahuan atau keaktifan politiknya semata. Temuan ini memperkuat relevansi kerangka *digital divide* sebagai lensa analisis utama dalam memahami stratifikasi partisipasi politik di era digital (Van Dijk, 2019), dan sekaligus memberikan implikasi kebijakan yang jelas bahwa perluasan dan peningkatan kualitas akses media informasi digital merupakan intervensi strategis yang paling berdampak untuk mendorong peningkatan partisipasi politik.

Perbandingan tipologi yang dihasilkan oleh penelitian ini dengan tipologi dalam literatur internasional menunjukkan konsistensi yang signifikan. Oser (2017) yang

mengembangkan pendekatan *person-centered* dalam pengukuran partisipasi menemukan bahwa warga dengan akses informasi politik yang tinggi cenderung menggunakan kombinasi tindakan partisipasi yang lebih beragam, sebuah pola yang tercermin dalam profil Partisipan Aktif di penelitian ini. Pada saat yang sama, keberadaan kelompok yang memiliki akses namun tidak berpartisipasi (Partisipan Moderat) mengonfirmasi temuan Oser et al. (2022) bahwa efikasi politik atau keyakinan bahwa partisipasi seseorang akan menghasilkan perubahan merupakan mediator kritis yang menentukan apakah akses media akan terkonversi menjadi partisipasi aktif atau tidak.

Implikasi Teoritis dan Kontribusi terhadap Literatur

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis yang penting. Pertama, penelitian ini menyediakan bukti empiris level lokal yang mengisi celah dalam literatur partisipasi politik digital Indonesia, yang selama ini didominasi oleh kajian nasional (Bramasta & Pierewan, 2023) atau kajian kualitatif-deskriptif (Ratnamulyani & Maksudi, 2018; Dwitama et al., 2022). Dengan menggunakan analisis kluster kuantitatif pada level Kota dan Kabupaten, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan tipologis dapat mengungkap variasi partisipasi yang tidak terlihat dalam analisis agregat, sebagaimana diadvokasikan oleh Syamsu et al. (2025) dalam konteks konfigurasi kelas dan partisipasi politik.

Kedua, Penelitian ini memberikan validasi empiris terhadap kerangka tipologi Fu et al. (2016) yang dikembangkan dalam konteks Hongkong, dengan menunjukkan bahwa tiga tipologi partisipasi yaitu *active participants*, *standby citizens*, dan *disengaged citizens*, dapat direplikasi secara empiris melalui analisis K-Means dalam konteks Indonesia. Hal ini memperluas generalisabilitas kerangka tersebut dari konteks Asia Timur ke konteks Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai negara demokrasi berkembang dengan karakteristik heterogenitas digital yang tinggi.

Ketiga, temuan mengenai tidak adanya perbedaan signifikan antara Kota dan Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap debat mengenai *digital divide* di Indonesia. Hadi (2018) mengidentifikasi kesenjangan digital rural-urban sebagai hambatan utama bagi inklusi digital di Indonesia, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks wilayah periurban yang terhubung dengan koridor metropolitan seperti Bogor, kesenjangan tersebut telah mengecil secara signifikan. Ini memberikan nuansa penting pada argumen tentang digital divide: kesenjangan akses semakin bukan tentang rural-urban, melainkan tentang kapasitas penggunaan dan pemanfaatan, sejalan dengan konsep *second* dan *third-level digital divide* Van Dijk (2019). Keempat, penelitian ini berkontribusi pada metodologi penelitian partisipasi politik dengan mendemonstrasikan bagaimana analisis K-Means dapat diintegrasikan dengan uji regresi dan korelasi untuk membangun pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara akses media dan partisipasi politik. Pendekatan multi-metode kuantitatif ini mengisi celah metodologis yang diidentifikasi dalam

pendahuluan, di mana sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu pendekatan analisis (Jayawinangun & Valdiani, 2020; Rohendi & Muzzammil, 2021) atau pendekatan kualitatif deskriptif (Ratnamulyani & Maksudi, 2018; Zainudin, 2024).

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian ke Depan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, penggunaan *convenience sampling* membatasi kemampuan generalisasi statistik hasil penelitian terhadap seluruh populasi pemilih Kota dan Kabupaten Bogor. Meskipun ukuran sampel ($n = 404$) telah melampaui ambang minimum Lemeshow dan heterogenitas responden terjaga dengan baik, temuan penelitian ini perlu diinterpretasikan dalam kerangka eksplorasi tipologis, bukan generalisasi representatif (Lehdonvirta et al., 2020; Zack et al., 2019).

Kedua, tidak terpenuhinya asumsi linearitas dan normalitas meskipun telah dijustifikasi secara statistik melalui ukuran sampel yang besar dan Central Limit Theorem mengindikasikan bahwa hubungan antara akses media dan partisipasi politik kemungkinan bersifat non-linear dan kompleks. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi model non-linear atau model mediasi yang memasukkan variabel kepercayaan politik, literasi digital, dan minat politik sebagai mediator dalam hubungan antara akses media dan partisipasi.

Ketiga, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang hanya menangkap gambaran pada satu titik waktu. Mengingat bahwa data dikumpulkan pada periode pasca-Pilkada 2024 ketika momentum elektoral masih segar dalam ingatan responden terdapat kemungkinan bahwa tingkat partisipasi yang terukur bersifat situasional dan tidak sepenuhnya mencerminkan pola partisipasi jangka panjang. Penelitian longitudinal yang mengikuti perubahan tipologi partisipasi sepanjang siklus elektoral akan memberikan pemahaman yang lebih dinamis dan komprehensif.

Keempat, analisis K-Means yang digunakan dalam penelitian ini belum menyertakan variabel kepercayaan politik dan minat politik sebagai dimensi pembentuk tipologi, meskipun kedua variabel tersebut telah diukur dalam kuesioner. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tipologi yang lebih kaya dengan mengintegrasikan dimensi afektif dan motivasional tersebut, sehingga menghasilkan segmentasi partisipasi yang lebih holistik sejalan dengan kerangka Jeroense dan Spierings (2023) tentang profil partisipasi berbasis multi-dimensi.

Agenda penelitian ke depan yang paling mendesak adalah pengembangan model intervensi berbasis tipologi yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini. Bagi kelompok Partisipan Moderat yang merupakan kelompok terbesar, intervensi yang paling relevan adalah program mobilisasi yang mengatasi hambatan konversi antara kesadaran dan tindakan politik misalnya melalui desain platform digital yang lebih partisipatif dan mekanisme umpan balik yang memperkuat efikasi politik warga (Oser et al., 2022). Bagi kelompok Partisipan Pasif, intervensi yang paling mendesak adalah program literasi digital dan literasi politik yang terintegrasi,

yang tidak hanya meningkatkan akses media tetapi juga membangun kapasitas untuk memanfaatkan informasi politik secara bermakna (Ridha & Riwanda, 2020). Pendekatan berbasis tipologi ini menawarkan kerangka yang lebih presisi untuk merancang kebijakan peningkatan partisipasi dibandingkan pendekatan satu-ukuran-untuk-semua yang masih dominan dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab ketiga tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, akses media informasi digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor. Meskipun kekuatan pengaruhnya tergolong lemah hingga sedang, hubungan ini bersifat konsisten dan bermakna secara empiris. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan akses media digital memang berkontribusi pada peningkatan keterlibatan politik warga, namun akses semata tidak cukup—literasi digital, kepercayaan terhadap institusi politik, dan minat politik merupakan faktor komplementer yang menentukan apakah akses tersebut dapat terkonversi menjadi partisipasi yang aktif dan substansial.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam hal akses media informasi digital maupun partisipasi politik. Temuan ini menantang asumsi konvensional bahwa wilayah urban secara otomatis unggul atas wilayah periurban dalam hal digitalisasi dan keterlibatan politik. Kondisi tersebut mencerminkan fenomena homogenisasi digital yang terjadi seiring semakin meratanya penetrasi internet di kawasan Bogor sebagai bagian dari koridor metropolitan Jabodetabek, sehingga dikotomi urban-periurban tidak lagi relevan sebagai penjelas utama variasi partisipasi politik di wilayah ini.

Ketiga, analisis K-Means Clustering berhasil mengidentifikasi tiga tipologi partisipasi politik yang berbeda secara substansial di kalangan masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor: Partisipan Aktif dengan akses media dan partisipasi politik yang tinggi. Partisipan Moderat dengan akses dan partisipasi pada level menengah, serta Partisipan Pasif yang paling terbatas dalam akses maupun keterlibatan politiknya. Ketiga tipologi ini berkorespondensi dengan kerangka *active participants*, *standby citizens*, dan *disengaged citizens* dari Fu et al. (2016), sekaligus membuktikan bahwa intensitas akses media informasi digital merupakan dimensi yang paling tajam dalam membedakan pola partisipasi antarkelompok. Temuan ini menegaskan bahwa variasi partisipasi politik lebih ditentukan oleh karakteristik individu dalam mengakses dan memanfaatkan media digital, bukan oleh batas geografis administratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada level lokal yang selama ini masih terbatas dalam literatur partisipasi politik digital Indonesia, sekaligus memvalidasi kerangka tipologi partisipasi berbasis analisis klaster dalam konteks masyarakat urban-periurban Indonesia. Implikasi praktis penelitian ini mengarah pada pentingnya pendekatan berbasis tipologi dalam merancang

program peningkatan partisipasi, kelompok Partisipan Moderat yang mendominasi memerlukan program mobilisasi yang mengonversi kesadaran menjadi tindakan, sementara kelompok Partisipan Pasif memerlukan intervensi literasi digital dan literasi politik yang terintegrasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model mediasi yang memasukkan kepercayaan politik dan literasi digital sebagai variabel antara, menggunakan desain longitudinal untuk melacak perubahan tipologi lintas siklus pemilu, serta mereplikasi pendekatan ini di wilayah-wilayah lain di Indonesia (Oser et al., 2022; Ridha & Riwanda, 2020).

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Roni Jayawinangun, M.Si selaku dosen pembimbing penulis dan Bapak Ahsani Taqwim Aminudin, M.I.Kom dari Universitas Pakuan atas bimbingan dan arahnya selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan tim PKM Mediainvite yang telah membantu proses pengumpulan data dan penyebaran kuesioner di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Penulis juga berterima kasih kepada Editor Jurnal Kanal atas bantuan dalam penyuntingan naskah ini, serta kepada KPU Kota Bogor dan KPU Kabupaten Bogor yang telah memberikan akses terhadap data pemilih yang mendukung proses penelitian. Terakhir, Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada kerabat dan teman penulis yang sudah mendukung penulis hingga saat ini. penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh 404 responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Anggraeni, K. A. R., Permatasari, O. D., Widjaya, M. F. P., Hawari, H., Yuandari, W., & Jayawinangun, R. (2025). From Connectivity to Commitment: How Political Information Sources Shape Voter Participation in Bogor City and Regency. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 6(4), 573–581. <https://doi.org/https://doi.org/10.46336/ijbesd.v6i4.1106>
- APJII. (2024). Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Arini, N. (2024). 2024 Simultaneous Regional Elections: Examining The Factors Behind Low Voter Turnout (Vol. 16, Issue 23). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Inf%20Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343-EN.pdf
- Boulianne, S. (2018). Twenty Years of Digital Media Effects on Civic and Political Participation. 47(7), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0093650218808186>
- Boulianne, S., Copeland, L., & Koc-michalska, K. (2024). Digital media and political consumerism in the United States, United Kingdom, and France. 26(4), 2110–2130. <https://doi.org/10.1177/14614448221083025>
- Bramasta, A. S., & Pierewan, A. C. (2023). Intensitas akses media digital dan partisipasi politik di Indonesia: data WVS7 2018. *Dimesia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(02),

- 99–111.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i2.60992>
- Desersis, M. (2021). Reducing the Burden of Decision in Digital Democracy Applications: A Comparative Analysis of Six Decision-making Software. *Science, Technology, & Human Values*, 48(2), 401–427. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01622439211054081>
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 54–66. <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- K., Wong, P. W. C., Law, Y. W., & Yip, P. S. F. (2016). Building a typology of young people 's conventional and online political participation : A randomized mobile phone survey in Hong Kong , China. *Journal of Information Technology & Politics*, 3(2), 126– 141. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/19331681.2016.1158138>
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide : Rural-Urban Linkages? *Digital Divide: Rural-Urban Linkages?*, 22(1), 17–33. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Hunawa, R., & Polinggapo, J. (2025). Rational Voters and Emotional Voters : Analysis of Socio-Psychological Factors in Voting Behavior in the 2024 Presidential Election. *Public Policy Journal*, 6(1), 40–53. <https://doi.org/10.37905/ppj.v6i1.2872>
- Jayawinangun, R., & Valdiani, D. (2020). Tipologi Partisipasi Politik Pemilih Laki-Laki Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi Politik. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 31– 39. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.31-39>
- Lehdonvirta, V., Oksanen, A., Räsänen, P., & Blank, G. (2020). Social Media , Web , and Panel Surveys : Using Non - Probability Samples in Social and Policy Research. 134–155. <https://doi.org/10.1002/poi3.238>
- Lestari, A. P., & Rohimakumullah, M. A. A. (2022). Strategi Pengelolaan Instagram Sebagai Media Informasi Publik Oleh Pemkot Bogor Di Masa Pandemi Covid-19. 11(1). <https://doi.org/10.21070/kanal.v11i1.1686>
- Lorenz-spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7, 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Nanjundeswaraswamy, & Divakar, S. (2021). Determination Of Sample Size And Sampling Methods In Applied Research. *Proceedings on Engineering Sciences*, 03(1), 25–32. <https://doi.org/10.24874/PES03.01.003>
- Nieminen, P. (2022). Application of Standardized Regression Coefficient in Meta-Analysis. *BioMedInformatics*, 2(3), 434–458. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/biomedinformatics2030028>
- Oser, J. (2017). Assessing How Participators Combine Acts in Their “ Political Tool Kits ”: A PersonCentered Measurement Approach for Analyzing Citizen Participation. *Social Indicators Research*, 133(1), 235–258. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1364-8>
- Papathanassopoulos, S. (2025). Political Communication in the Age of Platforms. *Encyclopedia*, 5(2), 77. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/encyclopedia5020077>
- Rapeli, L. (2022). What is the best proxy for political knowledge in surveys? *PLoS One*, 17(8), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272530>
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu -Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154 –161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, Dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110 –121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>
- Rohendi, & Muzzammil, F. (2021). Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 46 –65.
- Sugandi, E. A., Putri, T. E., & Vermonte, P. (2024). Bright Prospect , Lingerin Shadows Toward an Inclusive Digital Transformation in Indonesia (N. Shimomura & J. A. Sopacua (eds.)). UNDP Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/publications/policy-volume-bright-prospect-lingerin-shadows-towardinclusive-digital-transformation>
- Syamsu, S., Ansar, M. C., & Nurlinah. (2025). Impact of class configuration on political participation : Evidence from Gowa Regency , Indonesia. *Front. Polit. Sci.* 7:1544614. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1544614>
- Van Dijk, J. (2019). Afterword : The State of Digital Divide Theory .
- Widodo, S., & Kristiyanto, J. (2025). Digital democracy : transforming political communication in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 9(1), 153 –168. <https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9524>
- Zack, E. S., Kennedy, J. M., & Long, J. S. (2019). Can nonprobability samples be used for social science research? A cautionary tale. *Journal of the European Survey Research Association*, 13(2), 215 –227. <https://doi.org/https://doi.org/10.18148/srm/2019.v13i2.7262>
- Zainudin, A. (2024). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Z Di Pedesaan Pada Pemilu Tahun 2024 Suatu Studi Di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang. *FOKUS (Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang)*, 22(2), 295 –303. <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/fokus.v22i2.1232>

Zetra, A., & Marisa, S. (2022). Political Awareness, Knowledge, And Participation Relationship Using Structural Equation Modeling Approach. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1), 46–56.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36325>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. Copyright © Mochammad Fahrezi Putra Widjaya, Roni Jayawinangun, dan Ahsani Taqwim Aminuddin. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.